



## TERBAIKANNYA LINGKUNGAN HIDUP DALAM PEMBANGUNAN

Sri Nurhayati Qodriyatun\*)

### Abstrak

*Bencana alam yang terjadi di beberapa wilayah Indonesia menunjukkan telah terjadi kerusakan lingkungan. Ini mengindikasikan pengabaian lingkungan hidup dalam pembangunan. Mengingat lingkungan hidup merupakan hak asasi dan hak konstitusional maka DPR perlu melakukan pengawasan terhadap penyusunan rencana atau program pembangunan, serta pelaksanaan kebijakan pemerintah agar selalu memperhatikan pelestarian lingkungan. Pengawasan DPR juga dilakukan kepada pemerintah dalam penyusunan anggaran pembangunan dan regulasi agar sejalan dengan pembangunan berkelanjutan.*

### Pendahuluan

Serangkaian bencana alam kembali terjadi di beberapa wilayah Indonesia. Seperti banjir di Kabupaten Bojonegoro, Tuban, Bandung, Gunung Kidul, Kota Bandung; longsor di Kabupaten Sukabumi; dan krisis air bersih di Provinsi NTB. Bahkan BNPB mencatat ditahun 2016 terjadi 1.985 kejadian bencana, dengan frekuensi kejadian banjir yang paling tinggi (659 kejadian). Selanjutnya berturut-turut adalah angin puting beliung 572 kejadian, longsor 485, kebakaran hutan dan lahan 178, kombinasi banjir dan longsor 53, gelombang pasang dan abrasi 20, gempa bumi 11, dan erupsi gunung api 7 kejadian. Terjadinya berbagai bencana tersebut menunjukkan telah terjadi kerusakan lingkungan.

Tingginya kerusakan lingkungan hidup di beberapa daerah di Indonesia dapat

dilihat dari Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH). Berdasarkan IKLH Indonesia tahun 2014, dari 33 provinsi hanya 17 yang nilai IKLH nya di atas IKLH Nasional. Nilai IKLH 5 terendah berada di DKI Jakarta (36,8), Banten (43,6), Jawa Barat (45,0), DIY (49,5), dan Riau (52,6).

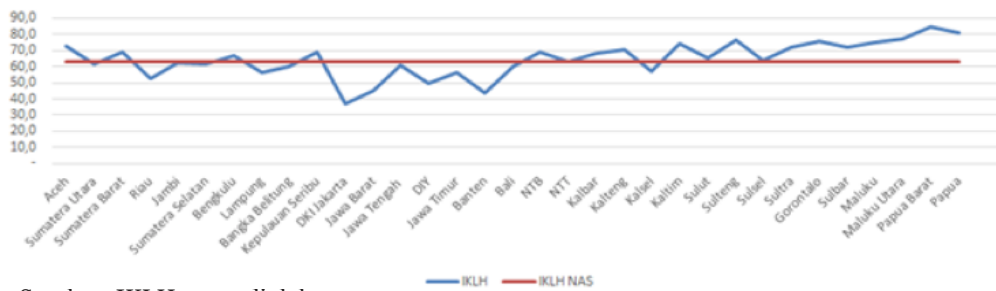
Tulisan ini akan mengulas bagaimana terbaikannya sektor lingkungan hidup dalam proses pembangunan selama ini dan upaya apa yang perlu dilakukan DPR agar sektor lingkungan hidup dapat berjalan seiring dengan pembangunan ekonomi dan sosial.

### Pembangunan Seringkali Mengabaikan Lingkungan

Lingkungan dan pembangunan seringkali dikondisikan sebagai dua hal

\*) Peneliti Madya Kebijakan Lingkungan pada Bidang Kesejahteraan Sosial, Pusat Penelitian, Badan Keahlian DPR RI.  
Email: sri.qodriyatun@dpr.go.id





Sumber: IKLH 2014, diolah.

Gambar 1. IKLH per Provinsi Tahun 2014

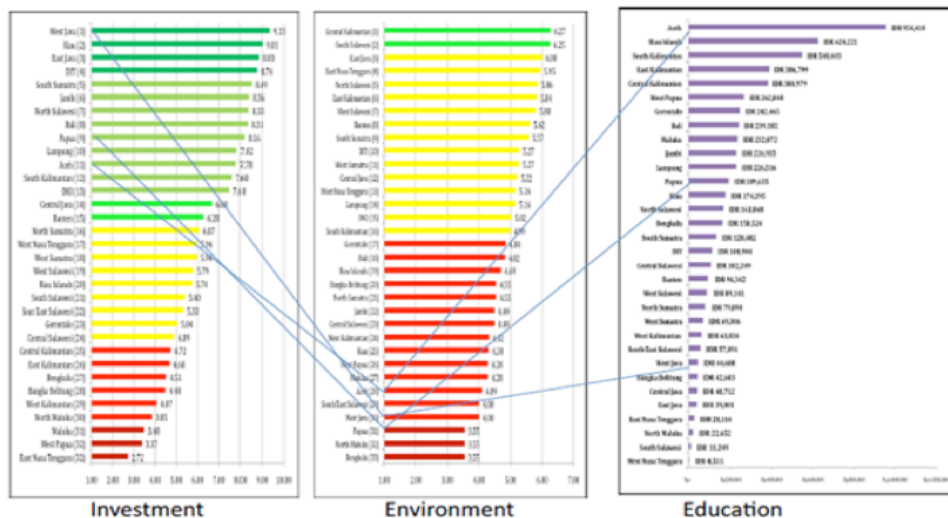
yang tidak dapat berjalan bersamaan. Pembangunan dalam pelaksanaannya seringkali mengorbankan lingkungan, karena peningkatan usaha pembangunan akan diiringi dengan peningkatan penggunaan sumber daya alam.

Sumber daya alam Indonesia telah lama menjadi sumber penting bagi pendanaan pembangunan. Bahkan menurut World Bank (2006), 25 persen sumber daya alam Indonesia merupakan total aset kemakmuran negara. Sehingga wajar jika kerusakan lingkungan terjadi di beberapa wilayah Indonesia.

Kemitraan Partnership pernah melakukan pengukuran terhadap keterkaitan antara investasi, lingkungan hidup, dan pembangunan sumber daya manusia melalui pengukuran Indonesia Governance Index (IGI) (Gismar dkk, 2013). Memfokuskan pada performa pemerintah daerah, Kemitraan menyimpulkan bahwa provinsi dengan investasi tinggi tidak selalu menganggangkan pemeliharaan lingkungan secara proporsional.

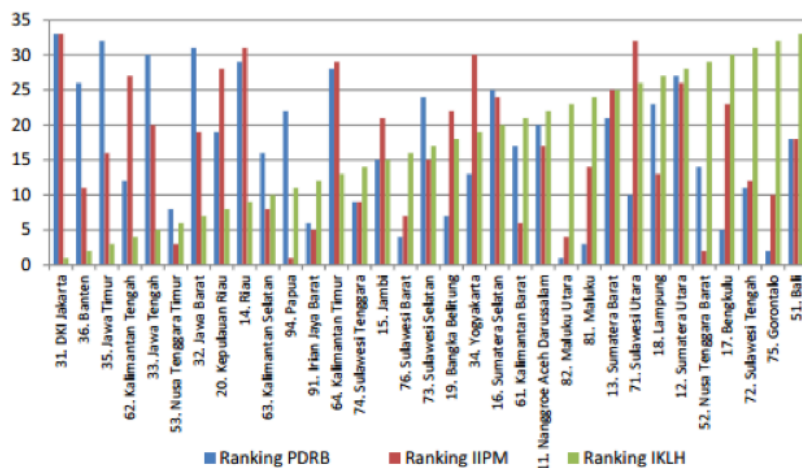
Data IGI di atas menunjukkan nilai investasi Provinsi Jawa Barat merupakan

yang tertinggi dari 32 provinsi yang ada di Indonesia, dengan indeks 9,33. Namun, indeks lingkungan hidupnya 4 terendah dari 32 provinsi (4,00), sebagaimana investasi untuk pendidikannya yang hanya Rp44.688 per peserta didik per tahun (Gismar dkk, 2013). Maka wajar jika tingkat kejadian bencana banjir dan tanah longsor di Provinsi Jawa Barat cukup tinggi. Menurut data BNPB, banjir dan longsor dalam tahun 2016 paling sering terjadi di Provinsi Jawa Barat (80 kejadian), kemudian Provinsi Jawa Tengah (76 kejadian) dan Provinsi Jawa Timur (60 kejadian). Gambaran ini diperkuat dengan hasil perhitungan Fauzi (dalam Fauzi dan Octavianus, 2013) yang menghitung korelasi antara Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB), dan ranking IKLH. Dari perhitungan Fauzi terlihat bahwa provinsi dengan indikator ekonomi dan IPM yang tinggi seperti DKI Jakarta cenderung memiliki IKLH rendah (Grafik 3). Berbagai gambaran di atas memperlihatkan bahwa lingkungan seringkali diabaikan dalam proses pembangunan.



Sumber: Gismar dkk, 2013.

Gambar 2. Indikator Investasi, Lingkungan, dan Anggaran



Sumber : Fauzi, 2012.

Gambar 3. Korelasi antara IPM, PDRB, dan ranking IKLH

### Apa yang harus dilakukan?

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi dan hak konstitusional bagi setiap warga negara Indonesia. Oleh karena itu, pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan mempunyai kewajiban untuk melindunginya dan mengelolanya dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan.

Pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) dalam beberapa dekade belakangan menjadi topik menarik, terutama setelah *Millenium Development Goals* (MDGs) berakhir di tahun 2015 dan digantikan dengan *Sustainable Development Goals* (SDGs). Dalam dokumen SDGs dicantumkan arahan tentang pentingnya tiga dimensi pembangunan berkelanjutan, yaitu ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup yang harus bersinergi dalam pembangunan ke depan. SDGs menjadi pekerjaan rumah tersendiri bagi pemerintah Indonesia, jika mengingat tujuan ke 7 (kelestarian lingkungan hidup) dari capaian MDGs Indonesia yang belum terealisasi.

Pelestarian lingkungan hidup dalam nawacita Presiden Joko Widodo tidak disebutkan secara eksplisit. Nawacita hanya memuat: (1) penguatan perlindungan keamanan nasional dengan membangun pertahanan negara dengan konsep Tri Matra; (2) membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya; (3) membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah atau desa; (4) melakukan reformasi sistem dan

penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya; (5) meningkatkan kualitas hidup manusia melalui peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan serta kesejahteraan masyarakat; (6) meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional; (7) mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor strategis ekonomi domestik; (8) melakukan revolusi karakter bangsa melalui kebijakan penataan kurikulum pendidikan nasional; (9) memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial.

Kesembilan prioritas pembangunan dalam nawacita tersebut hanya merangkum pola pembangunan ekonomi, sosial, dan politik. Padahal bencana yang sering terjadi selama ini adalah karena kerusakan lingkungan, yang ke depannya akan berpengaruh terhadap kinerja sosial dan ekonomi masyarakat. Untuk itu, DPR perlu mengingatkan pemerintah untuk tidak melupakan pembangunan lingkungan dalam melaksanakan program-program nawacitanya. Pembangunan yang searah dengan SDGs yang menerapkan pentingnya tiga dimensi pembangunan berkelanjutan. Salah satu instrumen yang dapat digunakan oleh pemerintah untuk melaksanakan pembangunan lingkungan adalah UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH). Melalui pelaksanaan UU tersebut, pemerintah dan pemerintah daerah mempunyai kewajiban:

1. menyusun kebijakan, rencana, atau program pembangunan yang dijiwai upaya melestarikan lingkungan hidup

- dan mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan;
2. menyusun anggaran pembangunan yang sejalan dengan prinsip ekonomi hijau seperti yang diatur dalam UU No. 32 Tahun 2009, yaitu anggaran berbasis lingkungan; dan
  3. memperhatikan perlindungan fungsi lingkungan hidup dan prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam penyusunan regulasi, baik di tingkat nasional maupun daerah.

## Penutup

Bencana alam yang terjadi di beberapa daerah menjadi indikator rusaknya lingkungan hidup suatu daerah. Berbagai hasil pengukuran pembangunan memperlihatkan bahwa pembangunan lingkungan hidup selalu tertinggal dibanding pembangunan sosial dan pembangunan ekonomi. Untuk itu, perlu ada upaya untuk meningkatkan pembangunan lingkungan hidup agar dapat berjalan seimbang dengan pembangunan sosial dan pembangunan ekonomi seperti yang diamanatkan UUD 1945 dan UU No. 32 Tahun 2009 melalui pelaksanaan pembangunan berkelanjutan.

DPR perlu melakukan pengawasan terhadap hal ini. Baik pengawasan dalam penyusunan rencana maupun program pembangunan, serta pelaksanaan kebijakan pemerintah agar selalu memperhatikan pelestarian lingkungan hidup dan mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan. Juga melakukan pengawasan terhadap pemerintah dalam penyusunan anggaran pembangunan dan penyusunan regulasi, agar sejalan dengan pembangunan berkelanjutan.

## Referensi

- “Bengawan Solo Meluap, 6.979 Rumah Terendam Banjir”, Jum’at, <http://news.okzone.com/read/2016/12/02/512/1556650/bengawan-solo-meluap-6-979-rumah-terendam-banjir>, diakses 2 Desember 2016.
- “Bandung Selatan Banjir Lagi”, <http://www.pikiran-rakyat.com/bandung-raya/2016/12/01/bandung-selatan-banjir-lagi-386470>, diakses 2 Desember 2016.
- “Bencana Longsor Sukabumi, Korban Tewas Terus Bertambah”, <http://www.pikiran-rakyat.com/jawa-barat/2016/12/04/bencana-longsor-sukabumi-korban-tewas-terus-bertambah-386797>, diakses 5 Desember 2016.
- Fauzi, Ahmad & Octavianus, Alex, *Background Study RPJMN 2015 - 2019 Indeks Pembangunan Lingkungan Hidup*, Jakarta: Bappenas, 2013.
- Laman resmi Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), <http://dibi.bnpb.go.id/data-bencana>, diakses 8 Desember 2016.
- Indonesia Governance Index, *Indonesia Governance Index 2012: Towards A Well-Informed Society and Responsive Government*, Jakarta: Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan. 2013.
- “Jelang UAS, Siswa Gunungkidul Sibuk Urus Banjir”, <http://regional.liputan6.com/read/2667594/jelang-uas-siswa-gunungkidul-sibuk-urus-banjir>, diakses 2 Desember 2016.
- “Jumlah Bencana pada 2016 Pecahkan Rekor 10 Tahun”, <http://www.pikiran-rakyat.com/nasional/2016/11/13/jumlah-bencana-pada-2016-pecahkan-rekor-10-tahun-384665>, diakses 5 Desember 2016.
- Kementerian Lingkungan Hidup, *Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Indonesia 2014*, Jakarta: KemenLH, 2015.
- “Kerusakan Lingkungan, Provinsi Kritis Air”, <http://www.sumeks.co.id/index.php/sumeks/nasional/24766-kerusakan-lingkungan-provinsi-kritis-air>, diakses 5 Desember 2016.
- “Sungai Bengawan Solo Siaga Merah, Banjir telah rendam 6.979 rumah di Bojonegoro dan Tuban”, <http://nasional.news.viva.co.id/news/read/854835-sungai-bengawan-solo-siaga-merah>, diakses 2 Desember 2016.
- World Bank, *Where is the Wealth of Nation? Measuring Capital for 21st Century*, Washington DC: The World Bank, 2006.